

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang dan bekerja dalam skala kecil. Sebagian besar Negara tidak memungkiri bahwa UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB dan aktivitas ekonomi Negeranya. UMKM mempunyai paling tidak tiga indikator yang menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian Indonesia diantaranya : 1) jumlahnya banyak dan mencakup setiap sektor ekonomi; 2) UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja; 3) UMKM memberikan kontribusi besar dalam pendapatan nasional (Anwar, 2013).

Ketangguhan UMKM tidak dapat diragukan lagi, terbukti bahwa UMKM mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998. Data Badan Pusat Statiska (BPS) menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998, jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, berbeda halnya dengan perusahaan besar. Hal tersebut terjadi karena UMKM tidak bergantung pada modal besar yang berasal dari luar negeri dalam mata uang asing, sehingga ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, UMKM tidak mengalami imbas dari krisis moneter saat itu.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang) (LPPI dan Bank Indonesia, 2015). Sedangkan kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 berdasarkan kekayaan dan pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 juta - 10 miliar	> 2,5 miliar - 50 miliar

Sumber : depkop.go.id diakses pada 11 september 2017

Dari Tabel 1.1 di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50.000.000,00 dengan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset lebih besar dari Rp 50.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 dengan omset lebih besar dari Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00, sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dengan omset lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Tabel 1.2.
Data Perkembangan UMKM di Indonesia Periode 2009-2013

No.	Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah UMKM	Unit	52764603	53823732	55206444	56534592	57895721
2.	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persentase	2.64	2.01	2.57	2.41	2.41
3.	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	96211332	99401775	101722458	107657509	114144082
4.	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persentase	2.33	3.32	2.33	5.83	6.03
5.	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1212599.3	1282571.8	1369326	1451460.2	1536918.8
6.	Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM	Persentase	4.02	5.77	6.76	6.00	5.89
7.	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	162254.52	175894.89	187441.82	166626.5	182112.7
8.	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persentase	2.57	8.41	6.56	11.10	9.29

Sumber : Data Badan Pusat Statistika 2016

Perkembangan UMKM secara kuantitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan Tabel 1.2. Jumlah UMKM terbanyak tercatat

pada tahun 2013 dengan jumlah 57.895.721 unit UMKM. Jumlah pertumbuhan UMKM rata-rata meningkat sebesar 2,408% setiap tahunnya. Begitu pula dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diserap, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 3,968%. Sedangkan pertumbuhan kontribusinya terhadap PDB setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,68%.

Di Jawa Tengah salah satu misi pembangunannya adalah : “Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, UMKM dan industri padat karya”. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan *One Village One Product (OVOP)* dengan pengembangan desa mandiri produktif, selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan percepatan izin usaha mikro kecil (LKIP Dinkop dan UMKM Jateng, 2015).



Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 1.1.

Grafik Perkembangan Jumlah UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah

Data Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008-2017 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 perkembangan jumlah UMKM binaan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 118.201 unit. Harus diakui, UMKM memiliki kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah (Sukesti, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat pemberdayaan peran serta masyarakat (LKIP, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerah, infrastruktur, ekonomi, sarana prasarana dan lain-lain. Upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM dapat menggerakkan pelaku UMKM yang ada di daerahnya untuk memaksimalkan produktivitas usahanya (Syakina, 2017).

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan industri rokok kreteknya. Kabupaten Kudus berhasil memaksimalkan hak otonomi daerahnya dengan tepat untuk mengembangkan potensi masyarakatnya guna mencapai pemerataan perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah di jadikan sebagai pilar utama sebagai program pro rakyat. Pemerintah Kabupaten Kudus dengan giat mengembangkan UMKM di berbagai sektor unit usahanya melalui berbagai

macam program, seperti peningkatan sumber daya manusia dengan cara pelaku UMKM dari Kabupaten Kudus diberikan kesempatan magang di berbagai daerah yang UMKM-nya lebih maju untuk belajar cara pemasaran, mengembangkan inovasi, cara mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan lain sebagainya. Program yang lain adalah mempermudah fasilitas permodalan berupa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempermudah UMKM mengembangkan usahanya. Program KUR tersebut sudah terealisasi mencapai 1.400 pelaku UMKM. Pameran produk UMKM juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus guna memperkenalkan produk-produk khas Kudus yang berkualitas dan dikenal di berbagai wilayah Indonesia. Pameran produk UMKM telah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia seperti di Kota Yogyakarta, Semarang, Bali, Lombok, Batam dan masih banyak lagi (Muria News, Produk UMKM Kudus Direncanakan Dipamerkan ke Mancanegara, <http://bit.ly/2IxZmoN> diakses pada tanggal 16 Februari 2018).

Perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus terbilang sangat bagus. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 14.511 unit jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif bagi pelaku UMKM agar naik kelas. Seperti yang pada awalnya usaha mikro naik menjadi usaha kecil, usaha kecil naik menjadi usaha menengah. Pola pembinaan UMKM yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Kudus inilah yang dapat dijadikan contoh pengembangan di tingkat Jawa Tengah. Oleh karenanya, Kabupaten Kudus disebut sebagai *pilot project* pengembangan UMKM di provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3.
Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus tahun 2016-2017

Jenis Usaha	2016	2017
Usaha Mikro	12.839	13.845
Usaha Kecil	788	565
Usaha Menengah	123	101
Jumlah	13.750	14.511

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus

Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa di tahun 2017 jumlah UMKM di Kabupaten Kudus secara global mengalami peningkatan. Dalam rentan waktu satu tahun saja, jumlah UMKM di Kabupaten Kudus bertambah sebanyak 801 unit UMKM.

Keberhasilan UMKM memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mempunyai peran sebagai penggerak utama dalam mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat beberapa UMKM yang dapat berkembang kemudian menjadi sukses, dan tak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Penelitian yang dilakukan oleh Jasra dkk (2011) di Pakistan mengemukakan bahwa keberhasilan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sumber modal, peran pemerintah, strategi pemasaran dan keterampilan

kewirausahaan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Paskitan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) yang meneliti tentang kesuksesan UKM batik Solo menyatakan bahwa peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Parastuty dkk (2009) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UKM di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik mengungkapkan bahwa variabel teknologi, akses modal dan inovasi memiliki hubungan positif dan kuat terhadap kesuksesan UMKM di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada UMKM di Kabupaten Kudus)” sebagai judul penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana pengaruh akses terhadap informasi bisnis terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh akses terhadap informasi bisnis terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pelaku UMKM penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan keberhasilan para pelaku UMKM.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM di Kabupaten Kudus dan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan untuk meningkatkan keberhasilan UMKM.